

Analisis Determinan Kedalaman Kemiskinan di Jawa Tengah: Peran Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota

Hibatulloh Muhamad Agil^{1*}, Maulidyah Indira Hasmarini²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

* E-mail: B300230213@student.ums.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 01-10-2026

Revision: 17-10-2026

Published: 25-10-2026

DOI Article:

10.62421/jibema.v4i2.867

ABSTRAK

Kemiskinan bukan hanya dipahami sebagai tidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan, pakaian, dan tempat tinggal; melainkan juga mencakup keterbatasan dalam memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap kedalaman kemiskinan pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019-2025. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan menerapkan metode regresi data panel yang diolah menggunakan *Eviews12*. Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman, model yang paling tepat adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM, TPT, dan UMK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kedalaman kemiskinan. Secara parsial, IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kedalaman kemiskinan, sedangkan TPT tidak berpengaruh signifikan. Sementara itu, UMK berpengaruh positif signifikan terhadap kedalaman kemiskinan.

Kata Kunci: Kedalaman kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Data Panel

ABSTRACT

Poverty is not only understood as a person's inability to meet basic needs for food, clothing, and shelter; it also encompasses limitations in accessing education, health care, and opportunities to participate in economic and social activities. This study aims to analyze the impact of the Human Development Index (HDI), the Open Unemployment Rate (OUR), and the Regency/City Minimum Wage (UMK) on the depth of poverty in 35 regencies and cities in Central Java Province during the 2019–2025 period. This study uses secondary data sourced from the Central Statistics Agency (BPS) and applies a panel data regression method processed using *Eviews 12*. Based on the results of the Chow Test and the Hausman Test, the most appropriate model is the Fixed Effects Model (FEM). The results show that the HDI, OUR, and UMK simultaneously have a significant effect on the depth of poverty. Partially, the HDI has a significant negative effect on the depth of poverty, while the TPT has no significant effect.

Acknowledgment

Meanwhile, the UMK has a significant positive effect on the depth of poverty.

Key word: *Poverty Depth, Human Development Index (HDI), Open Unemployment Rate (TPT), Regency/City Minimum Wage (UMK), Panel Data*

©2026 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi permasalahan sosial yang bersifat kompleks dan multidimensional dalam proses pembangunan ekonomi. Permasalahan ini dihadapi hampir di seluruh negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia (Harefa, 2022). Kemiskinan bukan hanya dipahami sebagai tidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan, pakaian, dan tempat tinggal; melainkan juga mencakup keterbatasan dalam memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial (Fragoso, 2025).

Berdasarkan cara pengukurannya, jenis kemiskinan yang sering digunakan di Indonesai bahkan oleh lembaga pemerintahan seperti Badan Pusat Statistik karena yang bersifat universal adalah kemiskinan absolut (Adon & Jeraman, 2023), dimana masyarakat kurang mampu diartikan sebagai golongan yang memiliki pengeluaran dibawah rata-rata garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) diartikan sebagai penghasilan terendah untuk mengukur kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup layak, dengan cara menjumlahkan Garis Kemiskinan Makanan (GMK) dengan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) (Permatasari, 2024). Tingginya tingkat kedalaman kemiskinan meunjukkan bahwa masyarakat kurang mampu tidak sekedar berada di bawah garis kemiskinan, melainkan berada jauh di bawahnya, sehingga perlu upaya dan sumber daya yang besar untuk mereka keluar dari garis kemiskinan (Utama & Sari, 2021). Karena itu, indeks kedalaman kemiskinan memberi gambaran yang sensitif dan akurat mengenai intensitas kemiskinan yang dialami suatu wilayah, sehingga menjadi dasar perencanaan yang lebih tepat bagi perumus kebijakan dalam pengentasan kemiskinan yang berpihak pada kelompok paling rentan (Croon et al., 2023).

Jawa Tengah termasuk salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, tingkat kemiskinan Jawa Tengah tercatat sebesar 10,47 persen yang mencakup sekitar 3,7 juta penduduk yang dikategorikan miskin, merupakan angka yang masih berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan nasional, yaitu sebesar 9,03 persen (Nur, 2024). Kondisi kemiskinan di Jawa Tengah juga ditandai dengan disparitas antarwilayah yang sangat mencolok. Daerah termiskin di Jawa Tengah pada tahun 2024 berada di Kabupaten Kebumen dengan tingkat kemiskinan mencapai 15,71%, disusul Kabupaten Brebes sebesar 15,6%, dan Kabupten Wonosobo sebesar 15,28%, sementara daerah dengan tingkat

kemiskinan terendah adalah Kota Semarang sebesar 4,03% (Yonatan, 2024).

Dari Sudut pandang kedalaman kemiskinan, terdapat variasi antarwilayah yang mencerminkan kesenjangan dalam kapasitas ekonomi serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Kabupaten dengan IPM rendah, TPT tinggi, dan UMK kecil cenderung memiliki nilai kedalaman kemiskinan yang tinggi, menandakan bahwa masyarakat kurang mampu di wilayah tersebut berada di bawah garis kemiskinan. ini menegaskan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kedalaman, khususnya pada tingkat kabupaten/kota.

Indeks Pembangunan Manusia adalah matrik menyeluruh yang tidak hanya mempertimbangkan Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan sebuah indikator gabungan yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan manusia (*human-centered development*) dari tiga aspek utama meliputi kesehatan, pendidikan, serta standar hidup layak (United Nations Development Programme, 1990). Dalam konteks kemiskinan, *Teori Human Capital* yang dikembangkan oleh (Becker, 1964; Schultz, 1961), menegaskan bahwa investasi pada manusia melalui pendidikan dan kesehatan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan produktivitas pada gilirannya dapat menaikkan tingkat pendapatan dan mengurangi risiko terperosok dalam kemiskinan. IPM berdampak negatif signifikan terhadap kemiskinan. artinya nilai IPM semakin tinggi dapat mendorong pengurangan kemiskinan karena adanya peningkatan produktivitas yang didukung oleh pencapaian dalam aspek pengetahuan, umur panjang, dan standar hidup layak, Hany & Mafruhah, 2023 dalam (Syahrazad & Vidriza, 2024). IPM tinggi mencerminkan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar, kapasitas produktif, serta kemampuan untuk keluar dari jebakan kemiskinan (*poverty trap*).

Pengangguran adalah faktor penentu utama kemiskinan pada literatur ekonomi pembangunan. John Maynard Keynes melalui *Keynesian Theory of Poverty* menjelaskan bahwa kemiskinan sebagian besar tidak bersifat sukarela (*involuntary*) tetapi disebabkan langsung oleh tingginya pengangguran (Keynes, 1936). Pengangguran terjadi akibat dari kegagalan pasar dan rendahnya permintaan agregat di dalam perekonomian, yang membuat penyerapan tenaga kerja menjadi tidak optimal.

Dalam negara berkembang, Todaro dan Smith menyatakan bahwa tingginya angka pengangguran berkorelasi kuat dengan rendahnya tingkat pendapatan rata-rata nasional serta memperlebar jurang ketimpangan distribusi pendapatan (M. p. Todaro & Smith, 2012). Angkatan kerja yang terjebak dalam pengangguran terbuka akan kehilangan sumber utama pendapatan mereka. Kondisi tanpa penghasilan ini secara otomatis menurunkan daya beli masyarakat secara ekstrem dan menciptakan *Poverty trap* (jebakan kemiskinan) bagi rumah tangga. Akibatnya, kesenjangan antara rata-rata pengeluaran masyarakat kurang mampu dengan garis kemiskinan semakin melebar. Idealnya, penurunan TPT dapat menurunkan angka kemiskinan, karena semakin sedikit seseorang tanpa penghasilan yang kesulitan

memenuhi kebutuhan mereka. Namun, penurunan angka pengangguran tidak selalu dibarengi dengan penurunan tingkat kemiskinan yang sejalan. Sinaga, 2020 dalam (Syahrazad & Vidriza, 2024)

Upah Minimum adalah kebijakan yang bertujuan melindungi pekerja dari eksploitasi upah yang berada di bawah standar hidup. *Teori Efficiency Wage* yang menegaskan bahwa penetapan upah diatas keseimbangan pasar dapat mendorong produktivitas tenaga kerja dan mengurangi kemungkinan pekerja jatuh dalam kemiskinan (Shapiro & Stiglitz, 1981). kenaikan UMK secara langsung meningkatkan pendapatan pekerja formal, mempersempit jarak antara pengeluaran pekerja berpenghasilan rendah dengan garis kemiskinan. Namun, terdapat argumen kontra bahwa kenaikan upah minimum yang terlalu tinggi mendorong substitusi tenaga kerja dengan kapital/ mesin dan meningkatkan pengangguran di sektor formal, yang pada gilirannya dapat memperburuk kondisi pekerja di sektor formal (Grajales-olarte et al., n.d.). Sehingga UMK dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin karena saat upah semakin tinggi perusahaan menganggap sebagai beban, sehingga perusahaan akan mengurangi jumlah karyawannya (Riyandini, 2024).

Sejumlah penelitian empiris yang telah mengkaji determinan kedalaman kemiskinan, diantaranya penelitian yang mengkaji hubungan IPM terhadap kedalaman kemiskinan di D.I. Yogyakarta mengonfirmasi bahwa IPM berpengaruh signifikan terhadap kedalaman kemiskinan (Hamid & Widodo, 2023). Selanjutnya penelitian yang dilakukan di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan UMK berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan (Putri, 2024). Terakhir penelitian yang mengkaji pengaruh tingkat pengangguran terhadap kedalaman kemiskinan di Provinsi NTB menjelaskan bahwa tingkat pengangguran dapat meningkatkan kedalaman kemiskinan (Aprirachman et al., 2025). Penelitian ini menghadirkan sejumlah kebaruan (*novelty*) yang membedakan secara substansial dari studi-studi terdahulu. Pertama, dari sisi cakupan wilayah dan unit analisis, studi ini menggunakan data panel 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah secara lengkap. Studi sebelumnya di Jawa Tengah menggunakan pendekatan spasial fokus pada UMK dan TPT sebagai variabel penjelas, tanpa memasukkan variabel IPM sebagai variabel independent (Kadafi et al., 2026). Kedua, dari sisi rentang waktu, penelitian ini mengobservasi tiga periode utama, yaitu era pra-pandemi (2019), masa kontraksi akibat COVID-19 (2020-2021), serta fase pemulihan ekonomi (2022-2025). Melalui pendekatan model estimasi Tunggal, studi ini menganalisis pengaruh secara simultan dari IPM, TPT, serta UMK, terhadap kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*); penggunaan variabel kedalaman kemiskinan dipilih karena lebih sensitif dalam mengukur intensitas kemiskinan. Studi terkini yang menggunakan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah hanya mencakup periode 2019-2024 dengan fokus pada kepesertaan JKN, akses layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan TPT terhadap kedalaman kemiskinan, belum mengintegrasikan ketiga variabel tersebut dalam satu model dengan kedalaman kemiskinan sebagai variabel dependen (Hidayati & Wiranataku-

suma, 2026).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berbentuk data panel, yang menggabungkan data lintas wilayah (*cross-section*) 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan data rentang waktu (*time series*) selama tujuh tahun, yaitu periode 2019-2025 sehingga memperoleh hasil analisis yang lebih mendalam (Liu, 2023). Provinsi Jawa Tengah dipilih karena memiliki tingkat populasi miskin terbesar ketiga nasional, meskipun secara persentase berada di papan tengah (peringkat 16). Pemilihan rentang waktu tujuh tahun terakhir karena periode ini mempresentasikan kondisi kemiskinan terkini, serta dampak dari pandemi COVID-19 terhadap IPM, UMK, TPT, dan kedalaman kemiskinan.

Tabel 1. Sumber Data Penelitian

No.	Variabel	Periode	Sumber Data
1	Indeks Pembangunan Manusia	2019-2025	Badan Pusat Statistik
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	2019-2025	Badan Pusat Statistik
3	Upah Minimum Kabupaten	2019-2025	Badan Pusat Statistik
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan	2019-2025	Badan Pusat Statistik

Sumber: BPS (2026)

Variabel dependen adalah kedalaman kemiskinan, yang menggambarkan rata-rata ketimpangan antara pengeluaran masyarakat kurang mampu dengan garis kemiskinan, dinyatakan dalam point. Variabel independen terdiri atas tiga variabel, yaitu: (1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam satuan poin; (2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam satuan persen; (3) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dalam rupiah. Variabel UMK ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (LN) untuk mengoreksi distribusi data yang tidak normal dan mengurangi heteroskedastisitas, sehingga model yang diestimasi berbentuk log-linear.

Analisis data panel memiliki tiga model utama, yaitu: *Common Effect Model* (PLS/CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) (Elisa et al., 2025). Pemilihan model terbaik dilakukan melalui dua tahapan pengujian statistik: (1) Uji Chow untuk menentukan antara CEM atau FEM; (2) Uji Hausman untuk menentukan antara FEM atau REM. Apabila hasil Uji Chow menunjukkan bahwa FEM lebih baik daripada CEM, maka Uji Lagrange Multiplier (LM) tidak perlu dilakukan (Febriyan et al., 2025). Seluruh estimasi dilakukan menggunakan program *EViews* 12.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui tiga pengujian statistik. Uji-t digunakan untuk menguji pengaruh antar variabel independen terhadap kedalaman kemiskinan. Uji-F digunakan untuk menguji

pengaruh variabel independen secara simultan terhadap kedalaman kemiskinan. Koefisien determinasi (R^2) dan Adjusted R^2 digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi kedalaman kemiskinan. Hipotesis pengujian adalah: (H1) IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kedalaman kemiskinan; (H2) TPT berpengaruh positif signifikan terhadap kedalaman kemiskinan; (H3) UMK berpengaruh negatif signifikan terhadap kedalaman kemiskinan.

Berdasarkan hasil pengujian, penelitian ini menerapkan *Fixed Effect Model* (FEM). Pemilihan FEM didasarkan pada kemampuannya dalam menjelaskan perbedaan karakteristik (heterogenitas) wilayah mulai dari kondisi geografis, struktur ekonomi dominan, kantong kemiskinan struktural, budaya lokal, dan demografi yang konstan. Maka, FEM dinilai lebih tepat dibandingkan CEM atau REM untuk menggambarkan hubungan antarvariabel. Persamaan regresi data panel dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 \ln X3_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y	: Kedalaman Kemiskinan provinsi I pada tahun t (point)
X1	: Indeks Pembangunan Manusia (point)
X2	: Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
X3	: Upah Minimum Kabupaten (Rupiah)
β_0	: Konstanta
$\beta_1 \dots \beta_3$	: Koefisien Variabel Independen
ε_{it}	: <i>Error Term</i>
i	: <i>Cross Section</i> (35 Kabupaten di Jawa Tengah)
t	: <i>Time Series</i> (2019-2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengolahan data penelitian ini menggunakan regresi data panel. Model tersebut diestimasi menggunakan tiga pendekatan, yaitu: PLS/CEM, FEM, dan REM. Hasil estimasi dari ketiga model tersebut disajikan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Hasil Estimasi Regresi CEM, FEM, REM

Variabel	Koefisien Regresi		
	CEM	FEM	REM
C	15,07136	-14,25843	-4,690944
IPM	-0,073037	-0,180895	-0,093268
TPT	0,033173	0,024666	0,038147
LOG(UMK)	-0,572790	1,991124	0,885465
R^2	0,315000	0,315000	0,131413
Adjusted. R^2	0,306473	0,850392	0,120600
Statistik F	36,94153	38,48445	12,15400

Variabel	Koefisien Regresi		
	CEM	FEM	REM
Prob. Statistik F	0,000000	0,000000	0,000000
1. Chow			
Cross - Section F (34,207) = 26,770118; Prob. F (34,207) = 0,0000			
2. Hausman			
Cross - Section Random χ^2 (3) = 11,001198; Prob. χ^2 = 0,0117			
3. Larange Multiplier			
Cross - Section Brusch-Pagan = 389,5736; Prob. Brusch - Pagan = 0,0000			

Sumber: Hasil olah data *Eviews 12*

Hasil Uji Chow menunjukkan nilai probabilitas F sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga model yang dipilih adalah FEM. Selanjutnya, hasil Uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas χ^2 sebesar $0,0117 < 0,05$, yang berarti FEM lebih tepat dibandingkan REM. Berdasarkan kedua pengujian tersebut, model estimasi yang digunakan adalah FEM dengan efek tetap lintas wilayah.

Tabel 3. Hasil Regresi FEM

$P1_{it} = -14,25843 - 0,180895 IPM_{it} + 0,024666 TPT_{it} + 1,991124 LOG(UMK)_{it}$ (0,0008)* (0,2410) (0,0019)*
$R^2 = 0,873078; DW = 1,698087; F\text{-stat} = 38,48445; Prob. F = 0,0000$

Sumber: *Eviews 12*.

Keterangan: *Signifikan pada $\alpha = 0,01$; **Signifikan pada $\alpha = 0,05$; ***Signifikan pada $\alpha = 0,10$; Angka di dalam kurung adalah probabilitas statistik t .

Uji- F menghasilkan nilai probabilitas $F\text{-statistik}$ sebesar $0,0000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa IPM, TPT, dan UMK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kedalaman kemiskinan. Kemudian, koefisien determinasi (R^2) 0,8730 berarti 87,30% variasi kedalaman kemiskinan disebabkan oleh variasi ketiga variabel independen dalam model, sedangkan 12,7% lainnya disebabkan oleh variasi variabel-variabel di luar model.

Berdasarkan hasil uji t , terdapat dua variabel independen dengan koefisien yang terbukti signifikan (probabilitas $t\text{-statistik}$ kurang dari $\alpha 0,01$), yaitu IPM dan UMK, sehingga kedua variabel tersebut secara statistik berpengaruh terhadap kedalaman kemiskinan. Sementara itu, TPT tidak berpengaruh terhadap kedalaman kemiskinan karena probabilitas $t\text{-statistik}$ lebih dari $\alpha 0,1$.

Nilai konstanta untuk setiap kabupaten di Jawa Tengah menunjukkan Kota Surakarta memiliki nilai konstanta tertinggi dalam model FEM, yaitu -12,71; hal ini mengindikasikan bahwa, terkait variabel X_1 , X_2 , dan X_3 terhadap Y di Jawa Tengah, Kota Surakarta memiliki rata-rata kedalaman kemiskinan tertinggi selama periode 2019-2025. Sebaliknya, nilai konstanta terendah dalam model FEM ditemukan pada Kabupaten Tegal, yaitu sebesar -15,59, yang menunjukkan bahwa dengan

mempertimbangkan faktor-faktor yang sama Kabupaten Tegal memiliki rata-rata kedalaman kemiskinan terendah selama periode 2019-2025.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kedalaman Kemiskinan

Hasil estimasi menunjukkan bahwa hasil Uji t terpilih tingkat probabilitas $-0,0008 < 0,01$, sehingga IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kedalaman kemiskinan dengan nilai koefisien $-0,180895$ mengindikasikan bahwa setiap kenaikan IPM sebesar 1 poin, maka kedalaman kemiskinan akan menurun sebesar $0,180895$ poin. Hubungan linier menunjukkan bahwa peningkatan IPM berkontribusi terhadap penurunan kedalaman kemiskinan melalui perbaikan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.

Hasil ini sejalan dengan penelitian (Indriani & Permatasari, 2022) serta (Syahrazad & Vidriza, 2024) la mengungkapkan bahwa peningkatan IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kedalaman kemiskinan. Peningkatan IPM memberikan bekal keahlian (*skill*) dan kondisi fisik yang prima bagi masyarakat rentan. Peningkatan modal manusia ini mendorong produktivitas kerja yang lebih tinggi, pada gilirannya memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk memperoleh upah yang lebih layak atau menjalankan usaha dengan lebih efisien. Peningkatan pendapatan ini secara struktural dapat mempersempit kesenjangan rata-rata antara pengeluaran masyarakat kurang mampu terhadap garis kemiskinan (*poverty gap index*), sehingga IPM menjadi instrument paling efektif untuk mengangkat masyarakat keluar dari jebakan kemiskinan (*poverty trap*).

Namun, hasilnya berbeda dengan temuan (Ringga, 2024) la menyatakan bahwa peningkatan IPM justru meningkatkan kemiskinan. Hubungan positif ini terjadi akibat adanya ketimpangan pembangunan manusia (*human capital inequality*). Peningkatan IPM di tingkat regional sering didominasi oleh perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan pada kelompok masyarakat kelas menengah ke atas, sementara kelompok masyarakat yang berada di lapisan terbawah (*the bottom 40%*) tetap mengalami hambatan akses (*barrier to entry*). Selain itu, fenomena *skill mismatch* di pasar tenaga kerja lokal di mana peningkatan pendidikan formal tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai memaksa tenaga kerja terdidik masuk ke sektor informal dengan upah rendah atau mengalami pengangguran sukarela.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kedalaman Kemiskinan

Hasil estimasi menunjukkan bahwa hasil Uji t terpilih TPT tidak berpengaruh signifikan terhadap kedalaman kemiskinan pada tingkat α sampai dengan 10%. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Rahman & Fasa, 2024) di lampung, yang menemukan bahwa TPT tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Kedepannya pemerintah daerah sebagai pemimpin daerah hendaknya lebih memperhatikan ketersediaan lapangan pekerjaan di wilayah kewarganegaraanya.

TPT tidak berpengaruh signifikan terhadap kedalaman kemiskinan di Jawa Tengah, yang mengindikasikan adanya fenomena katup penyelamat berupa pekerjaan sektor informal (*informal sector safety valve*). Fenomena ini sekaligus menjadi kritik terhadap asumsi transisi tenaga kerja dalam Teori Pembangunan Ekonomi Dua Sektor milik (Lewis, 1954). Dalam realitas ekonomi negara berkembang, ketika angkatan kerja kehilangan pekerjaan atau tidak terserap di sektor formal, mereka tidak serta-merta menganggur tanpa pendapatan seperti yang diasumsikan dalam transisi model klasik (M. P. Todaro & Smith, 2015). Karakteristik masyarakat kelas bawah cenderung lebih fleksibel untuk segera beralih menjadi pekerja informal demi bertahan hidup, seperti menjadi buruh tani harian, pedagang asongan, atau pelaku UMKM mikro sehingga tidak langsung tercatat memengaruhi pengangguran (Febrianti & Utami, 2025). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa sektor informal berfungsi sebagai bantalan ekonomi yang secara efektif meredam keparahan kemiskinan di tingkat akar rumput (Pitoyo, 2007).

Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Kedalaman Kemiskinan

Hasil estimasi menunjukkan bahwa hasil Uji t terpilih tingkat probabilitas $0,0019 < 0,01$. Sehingga UMK berpengaruh positif signifikan terhadap kedalaman kemiskinan dengan koefisien sebesar 1,991124 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan UMK 1 persen, maka kedalaman kemiskinan akan meningkat sebesar 0,01991124 persen.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ayuningtyas et al., 2024) menunjukkan bahwa kenaikan UMK justru dapat memperparah kemiskinan akibat dari pembengkakan biaya produksi perusahaan yang memicu naiknya harga barang, sehingga dampak dari kenaikan upah tersebut hanya menggantikan peningkatan biaya hidup masyarakat untuk hidup di atas garis kemiskinan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan peningkatan upah tidak serta-merta menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan jika tidak dibarengi dengan kontrol stabilitas harga komoditas.

Namun, hasilnya berbeda dengan temuan Nashiruddin et al., (2025) di Yogyakarta, menunjukkan bahwa peningkatan UMK dapat menurunkan kemiskinan. Hal ini karena kenaikan UMK dapat menambah daya beli pekerja yang berpenghasilan rendah, sehingga memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan Pendidikan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan data, dapat disimpulkan bahwa 87,30% variasi indeks kedalaman kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel IPM, TPT, dan UMK. IPM memiliki pengaruh negatif signifikan, yang menunjukkan bahwa peningkatan IPM dapat memperkecil kesenjangan antara pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sementara itu, TPT tidak berpengaruh signifikan yang artinya tingkat pengangguran tidak selalu berkorelasi secara linier dengan kedalaman

kemiskinan. Variabel UMK menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, hal ini disebabkan karena kenaikan upah minimum tidak berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diakibatkan oleh kenaikan harga barang.

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, analisis hanya mencakup tiga variabel independen, sehingga masih terdapat 12,7% variasi kedalaman kemiskinan yang belum dapat dijelaskan dalam model. Kedua, penggunaan UMK belum sepenuhnya menangkap daya beli riil pekerja karena tidak mempertimbangkan tingkat inflasi antarwilayah dan antarperiode. Ketiga, data kedalaman kemiskinan yang digunakan merupakan data tahunan sehingga tidak menangkap dinamika perubahan secara lebih rinci. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian berikutnya disarankan untuk: (1) menambahkan variabel lain seperti rasio Gini, aksesibilitas infrastruktur, atau pengeluaran pemerintah daerah untuk sektor sosial; (2) memperluas analisis dengan *Spatial Panel Econometrics* untuk menangkap efek limpahan (*spillover effect*) kemiskinan antarkabupaten/kota yang tidak terdeteksi dalam model panel konvensional (Andini & Wachidah, 2023). Dari sisi kebijakan, temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat peran sektor informal, meningkatkan kualitas SDM, memperluas peluang kerja di sektor unggulan, serta menyeimbangkan besarnya UMK guna melindungi daya beli pekerja dan kemampuan dunia usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Adon, M. J., & Jeraman, G. T. (2023). Kontribusi Teori Kemiskinan Sebagai Deprivasi Kapabilitas Dari Amartya Sen Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Miskin. *Jurnal Masyarakat Madani*, 8(1), 1–20.
- Andini, F. N., & Wachidah, L. (2023). *Penerapan Regresi Spasial Panel Random Effect pada Kasus Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2020*. 61–70.
- Aprirachman, R., Purnama, Y., & Safitri, O. (2025). *Pengaruh Pengangguran dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi NTB 2022-2024*. 3, 1022–1032.
- Ayuningtyas, P. I., Alhakim, R., & Ltif, E. A. (2024). *PENGARUH UPAH MINIMUM KABUPATEN / KOTA (UMK) DAN INDEKS ANGKA KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA*. 12(November), 219–222.
- Becker, G. s. (1964). *Human capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. National Bureau of Economic Research.
- Croon, T. M., Hoekstra, J. S. C. M., Elsinga, M. G., Longa, F. D., & Mulder, P. (2023). Beyond headcount statistics : Exploring the utility of energy poverty gap indices in policy design. *Energy Policy*, 177(October 2022), 113579. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2023.113579>
- Elisa, N., Aidid, M. K., & Meliyana, S. M. (2025). *Regression Analysis of Panel Data on Gross Enrolment Rate (GER) At Junior High School and Equivalent Education Levels in South Sulawesi Province in 2018-2022*. 6(1).
- Febrianti, E., & Utami, H. W. (2025). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Penduduk Miskin Di Jawa Timur Periode Tahun 2020-

2024. *Jurnal Edueco*, 8(2), 551–560.

- Febriyan, M. A., Hasmarini, M. I., Pembangunan, E., & Surakarta, U. M. (2025). *The Effect Of Economic Growth , Education And Unemployment On Distribution Inequality In Central Java 2020-2024 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Di Jawa Tengah Tahun 2020-2024*. 6(3), 1959–1968.
- Fragoso, K. P. (2025). Poverty as capability deprivation : Considering the relational approach , group-based analysis , and socio-structural lens. *European Journal of Social Theory*, 28(2), 247–263. <https://doi.org/10.1177/13684310241270471>
- Grajales-olarte, A., Ospina-tejeiro, J. J., Ramos-veloza, M. A., & Avila-Montealegre, O. I. (n.d.). *Macroeconomic Effects of the Minimum Wage in an Emerging Economy with Labor Informality*. 1–44.
- Hamid, Y., & Widodo, E. (2023). *Pemodelan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten / Kota Provinsi D . I . Yogyakarta Tahun 2017-2022 dengan Regresi Data Panel*. 1(3), 394–405.
- Harefa, P. A. (2022). Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Kemiskinan. *EL-THAWALIB*, 3(2), 363–374.
- Hidayati, D. T., & Wiranatakusuma, D. B. (2026). *The Impact of National Health Insurance (JKN) Participation , Access to Health Services , and Economic Factors on the Poverty Depth Index in Central Java Districts / Cities*. 14(3), 3439–3456.
- Indriani, R., & Permatasari, E. O. (2022). *Analysis of Factors Affecting Poverty Depth Index in Papua Province Using Panel Data Regression*. 96, 196–203.
- Kadafi, I. T., Shella, S., & Wara, M. (2026). *Implementation of the Semiparametric Geographically Weighted Logistic Regression (GWLRS) Model for Predicting Poverty Depth Index in Central Java Province*. 8(1), 119–132.
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Palgrave Macmillan.
- Lewis, W. A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. *The Manchester School*, 22(2), 139–191.
- Liu, E. (2023). *Panel Data Models : Understanding Concepts , Applications , and*. 2023. <https://doi.org/10.4172/RJE.1000158>
- Nashiruddin, R., Yuniarti, D., & Saleh, R. (2025). *A Study of Panel Data Approach : Analysis of Minimum Wage and Poverty In Yogyakarta , Indonesia*. 1(1), 20–32. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.630>.
- Nur, Z. (2024). *Warga Miskin Jateng Masih 3, 7 Juta Penduduk, di Atas Presentase Kemiskinan Nasional*. KOMPAS. COM. https://regional.kompas.com/read/2024/12/20/054227778/warga-miskin-jateng-masih-37-juta-penduduk-di-atas-persentase-kemiskinan?lgn_method=google&google_btn=onetap
- Permatasari, A. (2024). Mengkritisi Predikat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Provinsi Termiskin Di Pulau Jawa. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 168–183.
- Pitoyo, A. J. (2007). *DINAMIKA SEKTOR INFORMAL DI INDONESIA Prospek , Perkembangan , dan Kedudukannya dalam Sistem Ekonomi Makro*. 18(2).
- Putri, I. I. S. (2024). *Analisis pengaruh ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan upah minimum terhadap kemiskinan di provinsi jawa tengah*.

- Rahman, T., & Fasa, M. I. (2024). *Determinan Analysis of Poverty in Lampung Province*. 24(1), 192–209.
- Ringga, E. S. (2024). *Provincial Evidence : Long-Run Impact of Human Development Indicators on Poverty Gap and Severity*. 1(2). <https://doi.org/10.61975/gjbes.v1i2.26>
- Riyandini, S. (2024). Analisis Pengaruh IPM, Upah Minimum, TPT Dan Bantuan Sosial Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2022. *JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES*, 3(4), 1270–1285.
- Schultz, T. W. (1961). Investment in Human Capital. *The American Economic Review*, 51(1), 1–17.
- Shapiro, B. C., & Stiglitz, J. E. (1981). *Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline Device*. 433–444.
- Syahrazad, L., & Vidriza, U. (2024). *Jurnal of Development Economic and Digitalization*. 3(1), 109–129.
- Todaro, M. p., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development* (11th ed.). Pearson Education.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Pearson.
- United Nations Developmen Programme. (1990). *HUMAN DEVELOPMENT REPORT 1990*.
- Utama, K. P., & Sari, L. K. (2021). *Analisis Spasial Indeks Kedalaman Kemiskinan Tiga Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2021 (Spatial Analysis of the Poverty Gap Index of Three Provinces in Java Island in 2021)*. 2021, 353–362.
- Yonatan, A. Z. (2024). *10 Daerah Termiskin di Jawa Tengah 2024*. GoodStats. https://goodstats.id/article/10-daerah-termiskin-di-jawa-tengah-2024-PAVoF#google_vignette